

PDS terjemahan ini didasarkan pada versi Inggrisnya yang bertanggal 1 April 2013.



## LEMBAR DATA PROYEK

Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi mungkin tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. Informasi mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif.

**Tanggal Pembuatan PDS** –

**PDS Diperbarui** 14 Jan 2013

**Nama Proyek** Pertumbuhan Inklusif Melalui Program Peningkatan Konektivitas

**Negara** Indonesia

**Nomor Proyek/Program** 46093-001

**Status** Disetujui

**Lokasi Geografis** –

Dalam menyiapkan program atau strategi negara, atau pembiayaan proyek mana pun, atau dengan menyebut atau merujuk wilayah atau daerah geografis tertentu dalam dokumen ini, Asian Development Bank tidak bermaksud membuat penilaian apa pun mengenai status hukum atau status lainnya atas suatu wilayah atau daerah.

**Klasifikasi Sektor dan/atau Subsektor** Transportasi dan TIK  
/ Manajemen dan Kebijakan Transportasi

**Klasifikasi Tematik** Pertumbuhan ekonomi  
Pembangunan sektor swasta  
Kerja sama dan integrasi regional

**Kategori Pengarusutamaan Gender** Tidak ada elemen gender

## ■ Pembiayaan

Jenis/Cara Bantuan	Nomor Persetujuan	Sumber Pendanaan	Nilai yang Disetujui (ribu dollar)
Pinjaman	2942	Sumber daya modal biaya	300.000
Bantuan Teknis	8215	Dana Khusus Bantuan Teknis	1.000
<b>TOTAL</b>			<b>US\$ 301.000</b>

## ■ Kategori Perlindungan

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kategori perlindungan, lihat <http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories>

---

Lingkungan	C
------------	---

---

Pemindahan Bukan dengan Sukarela	C
----------------------------------	---

---

Masyarakat Adat	C
-----------------	---

---

## ■ Ringkasan Persoalan Lingkungan dan Sosial

---

Aspek Lingkungan
------------------

—

---

Pemindahan Bukan dengan Sukarela
----------------------------------

—

---

Masyarakat Adat
-----------------

—

---

## ■ Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

---

Selama Rancangan Proyek
-------------------------

—

---

Selama Pelaksanaan Proyek
---------------------------

—

---

## ■ Uraian

---

Program yang diusulkan akan mendukung pilar strategi utama rencana pembangunan pemerintah jangka menengah dan panjang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih inklusif melalui peningkatan konektivitas domestik dan internasional. Program berfokus membantu pencapaian agenda reformasi konektivitas pemerintah yang diprioritaskan, yang mencakup: (i) penguatan kerangka kerja koordinasi, regulasi, dan kelembagaan; (ii) peningkatan konektivitas intra-pulau yang ditujukan guna menghubungkan daerah pedesaan dengan pusat pertumbuhan regional, dan mempercepat pembangunan, serta pemeliharaan jaringan transportasi darat yang lebih baik; (iii) peningkatan konektivitas antar-pulau untuk memperbaiki efisiensi dan kinerja layanan transportasi; serta (iv) peningkatan konektivitas internasional dengan menjadikan sistem pelabuhan, logistik, dan intermoda utama di Indonesia lebih efisien dalam menangani peningkatan lalu lintas dan volume perdagangan.

---

## ■ Dasar Pemikiran Proyek dan Kaitan dengan Strategi Negara/Regional

---

### **Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kemiskinan.**

Pertumbuhan PDB meningkat 6,5% pertahun pada 2011, angka tertinggi sejak krisis keuangan Asia, berkat dukungan konsumsi pribadi, investasi yang lebih kuat, dan ekspor bersih yang meningkat. Meskipun tingkat pertumbuhan terus membaik, pertumbuhan ekonomi belakangan ini masih jauh lebih rendah daripada potensi pertumbuhan Indonesia. Untuk 2014-2016, IMF memperkirakan potensi tingkat pertumbuhan dasar sebesar 7,1%, yang dapat meningkat menjadi 7,9% jika pembangunan infrastruktur dan reformasi ekonomi dipercepat. Studi ADB baru-baru ini yang berjudul *Diagnosing the Indonesian Economy* juga mengidentifikasi kekurangan infrastruktur sebagai salah satu kendala penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Peringkat keseluruhan Indonesia dalam Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*) adalah ke-46 dari 142 negara. Namun, Indonesia hanya menempati peringkat 76 dari 142 negara dari segi mutu infrastruktur keseluruhan, jauh di bawah peringkat keseluruhannya, keadaan yang melemahkan daya saing Indonesia. Dampak ketertinggalan infrastruktur tampak dalam berbagai bentuk. Kondisi jalan yang semakin buruk di provinsi dan kabupaten/kota meningkatkan biaya transportasi dan logistik dalam negeri. Kepadatan pelabuhan dan sistem transportasi antar-pulau yang kurang berkembang menimbulkan biaya pengapalan domestik yang mahal. Sementara itu, kepadatan dan tidak produktifnya pelabuhan internasional telah membuat sektor manufaktur Indonesia tidak terintegrasi dengan baik dalam jaringan produksi internasional. Mencapai dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah memerlukan lingkungan yang kondusif bagi investasi lebih tinggi dalam infrastruktur.

### **Pengurangan kemiskinan.**

Pertumbuhan 6,5% pada 2011 menghasilkan sekitar 1,5 juta pekerjaan baru, melebihi jumlah orang yang baru memasuki angkatan kerja. Mutu pekerjaan juga meningkat seiring naiknya pekerjaan formal hingga 16,0% (5,7 juta pekerjaan). Kebanyakan pekerjaan adalah di bidang konstruksi, manufaktur, dan jasa. Pekerjaan di sektor informal turun 5,9% atau 4,2 juta pekerjaan seiring keluarnya para pekerja dari sektor pertanian. Namun, tantangan besar masih menghadang upaya pengurangan angka kemiskinan lebih jauh. Sekitar 62% dari angkatan kerja yang bekerja (sekitar 68,2 juta orang) masih dipekerjakan di sektor informal dengan upah dan jaminan pekerjaan yang rendah. Angka kemiskinan turun ke 12,4% pada September 2011 dari 13,3% pada Maret 2010. Meski kemiskinan dan pengangguran cenderung berkurang, banyak penduduk Indonesia yang masih rentan

---

---

terhadap guncangan ekonomi. Lebih dari 60 juta orang masih berada sedikit di atas garis kemiskinan dan berisiko tinggi jatuh kembali dalam kemiskinan. Tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 15,6% masih jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 9,1%. Tingkat kemiskinan di beberapa propinsi di wilayah timur jauh lebih tinggi daripada di tempat lain di Indonesia.

#### **Pertumbuhan inklusif melalui peningkatan konektivitas.**

Untuk mengatasi kemiskinan multidimensional di Indonesia, diperlukan tak hanya percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga proses pertumbuhan yang lebih inklusif, sehingga daerah pedesaan dan kawasan tertinggal memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik dan akses ke layanan sosial. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menurut luas negara dan populasi, serta sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia perlu meningkatkan konektivitas guna menjadikan pertumbuhannya lebih inklusif. Konektivitas Indonesia dapat ditingkatkan dengan: (i) konektivitas intra-pulau yang lebih baik guna menghubungkan area pedesaan dengan pusat pertumbuhan regional, yang penting untuk pengurangan kemiskinan pedesaan; (ii) konektivitas antar-pulau yang lebih baik antara kawasan barat dan timur Indonesia, yang penting untuk pengurangan angka kemiskinan di wilayah timur; dan (iii) peningkatan konektivitas internasional agar sektor produktif Indonesia lebih kompetitif, yang penting untuk mengurangi angka kemiskinan secara keseluruhan dan meningkatkan mutu pekerjaan dengan mengurangi besarnya angkatan kerja yang bekerja di sektor informal.

#### **Konvergensi strategi nasional pemerintah dan strategi ADB.**

Pemerintah menyadari bahwa tertinggalnya infrastruktur, kurang berkembangnya konektivitas intra-dan antar-pulau, lemahnya konektivitas internasional, serta inefisiensi logistik akan menghambat pencapaian target jangka menengah dan panjang dalam hal pertumbuhan yang lebih tinggi dan pengurangan kemiskinan yang lebih cepat. Secara strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 pemerintah memberikan arahan bagi dua pilar strategi kemitraan negara (CPS) Indonesia 2012-2014 dengan ADB: pertumbuhan inklusif dan kelestarian lingkungan. Reformasi yang didukung oleh program yang diusulkan akan menunjang pilar pertumbuhan inklusif CPS. Selain itu, meningkatkan konektivitas juga merupakan fokus strategi jangka panjang pemerintah dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025 (MP3EI). MP3EI akan memandu konvergensi intervensi ADB yang berbasis kebijakan, sektor, dan tematik, terkait dengan konektivitas dan visi pemerintah untuk percepatan pembangunan ekonomi.

---

## ■ **Dampak Pembangunan**

---

Penurunan biaya transportasi dan logistik

---

## ■ **Hasil Proyek**

---

### **Uraian Hasil**

### **Kemajuan Menuju Hasil**

Pemerintah meningkatkan konektivitas domestik dan internasional

–

---

## ■ Keluaran dan Kemajuan Pelaksanaan

Uraian Keluaran Proyek	Status Kemajuan Pelaksanaan (Keluaran, Kegiatan, dan Persoalan)
Diperkuatnya koordinasi konektivitas dalam hal kerangka kerja regulasi Dilaksanakannya inisiatif utama untuk meningkatkan konektivitas intra-pulau Disiapkannya langkah dan strategi untuk meningkatkan konektivitas antar-pulau Dijalankannya kebijakan utama untuk meningkatkan konektivitas internasional	–
Status Tujuan Pembangunan	Perubahan Material
–	–

## ■ Peluang Bisnis

<b>Tanggal Pencatatan Pertama</b>	13 Sep 2012
<b>Layanan Konsultasi</b> Dalam konsultasi dengan BAPPENAS, ADB akan merekrut konsultan sesuai kebutuhan di bawah CDTA (layanan konsultasi 34 orang-bulan, yang terdiri atas satu konsultan internasional untuk 16 orang-bulan dan dua konsultan nasional untuk 18 orang-bulan). Para konsultan dipilih dan dipekerjakan secara individual oleh ADB menurut Pedoman ADB tentang Penggunaan Konsultan (2010, sesuai revisi dari waktu ke waktu).	
<b>Pengadaan</b> Semua pengadaan di bawah CDTA akan mengikuti Pedoman Pengadaan ADB (2010, sesuai revisi dari waktu ke waktu).	
<b>Pemberitahuan Pengadaan dan Konsultasi</b> <a href="http://www.adb.org/projects/46093-001/business-opportunities">http://www.adb.org/projects/46093-001/business-opportunities</a>	

## ■ Jadwal

<b>Persetujuan Konsep</b>	25 Mei 2012
<b>Pencarian Fakta</b>	25 Jun 2012 sampai 13 Jul 2012
<b>Rapat Kajian Manajemen</b>	–
<b>Persetujuan</b>	16 Nov 2012
<b>Misi Kajian Terakhir</b>	–

## ■ Tonggak

No. Persetujuan	Persetujuan	Ditanda-tangani	Efektif	Selesai		
				Orisinal	Direvisi	Aktual
Bantuan Teknis 8215	16 Nov 2012	21 Feb 2013	21 Feb 2013	30 Okt 2014	–	–

## ■ Pemanfaatan

Tanggal	Nomor Persetujuan	ADB (ribu US\$)	Lainnya (ribu US\$)	Persentase Bersih
Pemberian Kontrak Kumulatif				
Pencairan Kumulatif				

## ■ Nilai Bantuan Teknis (ribu dolar)

Nomor Persetujuan	Nilai yang Disetujui	Nilai yang Direvisi	Komitmen Total	Saldo yang Belum Masuk Komitmen	Pencairan Total	Saldo yang Belum Dicairkan
Bantuan Teknis 8215	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000

## ■ Status Perjanjian

Perjanjian dipilah-pilah menurut berbagai kategori berikut—laporan keuangan proyek yang diaudit, perlindungan, sosial, sektor, keuangan, ekonomi, dan lain-lain. Pemenuhan terhadap perjanjian dinilai per kategori dengan menerapkan kriteria berikut: (i) Memuaskan—semua perjanjian dalam kategori tersebut telah dipenuhi, namun diperbolehkan maksimum satu pengecualian, (ii) Sebagian Memuaskan—maksimum dua perjanjian dalam kategori tidak dipenuhi, (iii) Tidak Memuaskan—tiga atau lebih perjanjian dalam kategori tidak dipenuhi.

No. Persetujuan	Kategori					
	Sektor	Sosial	Keuangan	Ekonomi	Lainnya	Perlindungan
Pinjaman 2942	–	–	–	–	–	–

## ■ Perincian Kontak dan Pembaruan

<b>Pejabat ADB yang Bertanggung Jawab</b>	Edimon Ginting (eginting@adb.org)
<b>Departemen ADB yang Bertanggung Jawab</b>	Departemen Asia Tenggara
<b>Divisi ADB yang Bertanggung Jawab</b>	Indonesia Resident Mission
<b>Lembaga Pelaksana</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

## ■ Tautan

<b>Situs Web Proyek</b>	<a href="http://www.adb.org/projects/46093-001/main">http://www.adb.org/projects/46093-001/main</a>
<b>Daftar Dokumen Proyek</b>	<a href="http://www.adb.org/projects/46093-001/documents">http://www.adb.org/projects/46093-001/documents</a>